

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan data serta hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional (SSN) meliputi: a) Perencanaan kurikulum diawali dengan penyusunan program pembelajaran, menyusun silabus dan RPP dan analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar, dimana kepala sekolah melibatkan guru-guru, komite sekolah dan orang tua siswa yang dilaksanakan melalui rapat tahunan, b) Pengorganisasian kurikulum kepala sekolah mengatur pembagian tugas secara merata sesuai dengan minat dan keahlian guru, penyusunan jadwal pelajaran dengan memerhatikan jumlah kelas, jumlah guru serta kemampuan guru dengan melibatkan wakil kepala sekolah. Karena hal ini akan menimbulkan rasa kebersamaan guru-guru dan meningkatkan motivasi guru, c) Kurikulum yang digunakan di Sekolah standar nasional yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dan untuk silabus dan RPP, silabus yang digunakan berasal dari edaran Dinas Pendidikan dan untuk RPP dikembangkan sendiri oleh guru, d) Evaluasi kurikulum di sekolah, kepala sekolah melakukan pengawasan atau supervisi kurikulum hal ini ditujukan untuk mengetahui tercapainya tujuan atau kompetensi dasar dan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran oleh guru.

Supervisi dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas dari Dinas Pendidikan yang dilakukan empat kali dalam satu semester .

2. Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah Standar Nasional (SSN) meliputi: a) Perencanaan sarana prasarana di sekolah kepala sekolah melibatkan guru-guru, tenaga administrasi, komite sekolah dan orang tua siswa dalam rapat tahunan untuk membahas perencanaan sarana prasarana untuk tahun ajaran baru berdasarkan analisis kebutuhan sekolah. Hal ini dilakukan agar bisa menunjang pembelajaran di sekolah, dengan melakukan langkah-langkah perencanaan berawal dari penyusunan daftar kebutuhan, estimasi biaya, menetapkan skala prioritas, b) Pengadaan sarana prasarana di Sekolah Standar Nasional (SSN) dananya berasal dari Pemerintah pusat. Dalam hal ini juga guru-guru dilibatkan dalam pengadaan fasilitas dan alat pembelajaran dan juga dalam kepanitiaan. c) Proses inventarisasi sarana prasarana dilakukan oleh kepala tata usaha atau pegawai administrasi yang terlibat. Pertama-tama kepala tata usaha menerima barang sesuai dengan yang tertera dalam daftar penerimaan barang pada saat serah terima pengadaan barang, setelah itu melakukan pencatatan barang ke dalam buku inventaris sesuai dengan golongan barang dan memberikan kode, setelah itu mendistribusikan barang sesuai alokasi dan membuat kartu inventaris ruangan dan kartu penggunaan alat, terakhir membuat laporan reguler tentang keadaan barang inventaris di sekolah.
3. Pengelolaan Ketenagaan Sekolah Standar Nasional (SSN) meliputi: a) Proses perencanaan ketenagaan didasarkan atas analisis kebutuhan, dalam proses

tersebut yaitu melihat adanya kekosongan-kekosongan guru dan tenaga administrasi, b) Proses rekrutmen dan penempatan ketenagaan di SMP Negeri 8 Gorontalo yaitu untuk perekrutan pihak sekolah melihat apabila ada kekosongan maka sekolah memakai jasa guru dari sekolah lain yang sudah PNS jadi tidak memberatkan pihak sekolah. Untuk penempatan tenaga guru maupun tenaga administrasi di sekolah sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Walaupun ada mata pelajaran yang tidak mempunyai guru bidang studi yang dimaksud maka guru yang mempunyai keahlian dibidang itu bisa menggantinya, c) Pembinaan pihak sekolah menghimbau kepada tenaga guru maupun tenaga administrasi untuk bisa mematuhi tata tertib yang berlaku, untuk pengembangan karir ketenagaan baik guru maupun tenaga kependidikan dari segi kepangkatan dan profesi mendapat dukungan penuh dari sekolah. Berupa guru-guru diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan dan bagi guru maupun tenaga administrasi yang belum S1 untuk melanjutkan kuliah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebagai gambaran bagi Dinas Pendidikan Nasional Kota Gorontalo dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah dalam rangka pengembangan dan pengendalian pendidikan yang mengacu pada standar yang ditetapkan secara nasional.
2. Bagi kepala sekolah agar bisa mengawasi kegiatan-kegiatan pengelolaan sekolah standar nasional mulai dari pengelolaan kurikulum, sarana prasarana, dan ketenagaan yang ada di sekolah.
3. Bagi guru agar bisa meningkatkan karir melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan dan juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di dunia pendidikan agar bisa meningkatkan kualitas pembelajaran
4. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan sekolah standar nasional.
5. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian tentang Pengelolaan Sekolah Standar Nasional (SSN).